



LABOR AND EXPENDITURE OF GOVERNMENT ON ECONOMIC GROWTH

(Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi)

Moh. Arif Novriansyah

Faculty Of Economics, Gorontalo University
email: moh.arif.novriansyah@gmail.com

Abstract

Generally, there are three main factors or components that influence economic growth in a region, all of which are capital accumulation, population growth and technological progress. According to Samuelson and Nourdhous (2004) states that one source of economic growth is population growth (labor force). Population growth (labor force) accompanied by employment will increase economic output. Increasing population will increase the number of workers and the addition allows an area to increase production. But on the other hand, the adverse effects of population increases that are not offset by employment opportunities will cause economic growth not in line with the increase in welfare.

The growth of an economy cannot be separated from the role of the government. The government must be recognized and trusted to assume a greater and more decisive role in efforts to manage the national / regional economy.

The purpose of this study was to determine the effect of labor and government expenditure on economic growth in Gorontalo Province. This research uses regression analysis method. The results of the study showed that the presence of labor or working population in Gorontalo Province which was quite high during 2007-2016 had an effect on economic growth in the province of Gorontalo. This can be seen in the direction of the variable labor regression coefficient (X1) with a positive value, which explains that the increase in the number of workers will increase economic growth in Gorontalo Province.

Keywords: Labor; Government Budget; Economy Growth.

Abstrak

Ada tiga faktor atau komponen utama yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, ketiganya adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Menurut Samuelson dan Nourdhous (2004) menyebutkan bahwa salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yaitu Pertumbuhan penduduk (angkatan kerja). Pertumbuhan penduduk (angkatan kerja) disertai dengan lapangan pekerjaan akan meningkatkan output perekonomian. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Namun di sisi lain, akibat buruk dari penambahan penduduk yang tidak diimbangi oleh kesempatan kerja akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan.

Pertumbuhan suatu perekonomian juga tidak bisa lepas dari peran pemerintah. Pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan lebih besar dan lebih menentukan di dalam upaya pengelolaan perekonomian nasional/daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya tenaga kerja atau penduduk bekerja di Provinsi Gorontalo yang cukup tinggi selama tahun 2007-2016 berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Gorontalo. Hal tersebut dapat dilihat pada arah koefisien regresi variabel tenaga kerja (X1) bernilai positif, yang menjelaskan bahwa kenaikan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo.

Kata Kunci : Tenaga Kerja; Pengeluaran Pemerintah; Pertumbuhan Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah mulai tahun 2004 sampai sekarang pada dasarnya bertujuan untuk mengefisienkan segala kebijakan yang berkaitan tentang urusan daerah, dengan harapan agar kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masing-masing daerah, sehingga mampu mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Diharapkan dengan penerapan otonomi daerah pertumbuhan ekonomi lebih baik dari masa sebelumnya.

Pada Umumnya, ada tiga faktor atau komponen utama yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, ketiganya adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Sedangkan menurut Samuelson dan Nourdhous (2004) menyebutkan bahwa salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yaitu Pertumbuhan penduduk (angkatan kerja). Pertama, pertumbuhan penduduk (angkatan kerja) disertai dengan lapangan pekerjaan akan meningkatkan output perekonomian. Pertumbuhan penduduk di sini juga mencakup produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Kedua, akumulasi modal. Pemilik modal akan memiliki kesempatan untuk melakukan investasi kembali sehingga akan meningkatkan output perekonomian. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat dalam pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga

kerja dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Namun di sisi lain, akibat buruk dari penambahan penduduk yang tidak diimbangi oleh kesempatan kerja akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan.

Pertumbuhan suatu perekonomian juga tidak bisa lepas dari peran pemerintah. Menurut Todaro (2000) pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan lebih besar dan lebih menentukan di dalam upaya pengelolaan perekonomian nasional/daerah. Menurut Mangkoesobroto (2008) peranan pemerintah yang harus dijalankan adalah :peranan alokasi yaitu pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang pihak swasta tidak dapat memproduksinya, peranan distribusi yaitu pemerintah melalui kebijakan fiskal merubah keadaan masyarakat sehingga sesuai dengan distribusi pendapatan yang diharapkan melalui pengenaan pajak progresif yaitu realtif beban pajak yang lebih besar bagi yang mampu dan mendistribusikan bagi yang kurang mampu, dan peranan stabilisasi yaitu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan goncangan ekonomi yang berlebihan. Kebijakan pengeluaran pemerintah dituangkan dalam APBD. Kebijakan pengeluaran pemerintah daerah dalam APBD tercermin dari total belanja pemerintah yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proposional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan.

Keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari bantuan pusat dan Pendapatan Asli Daerah merupakan bentuk dari akumulasi modal pemerintah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peranan strategis dari investasi pemerintah ini, sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat. Bertitik tolak dari uraian di atas maka perlu dikaji dan diteliti secara mendalam tentang “Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo”.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah Provinsi Gorontalo dengan ruang lingkup Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

2.2 Definisi Operasional

- 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu kondisi dimana terjadinya perkembangan GDP yang mencerminkan adanya pertumbuhan *output* perkapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat yang terjadi di Provinsi Gorontalo, yang dihitung setiap tahunnya dalam persen.
- 2.2.2 Tenaga Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang bekerja, atau melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinyu selama seminggu di Provinsi Gorontalo.

2.2.3 Pengeluaran Pemerintah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

2.3 Metode Pengumpulan Data

2.3.1 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengutip beberapa literatur-literatur seperti : data-data terkait jumlah tenaga kerja dan besaran pengeluaran pemerintah serta persentase pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo. Dengan kata lain peneliti mengumpulkan data yang sifatnya dokumen sehubungan dengan objek yang akan diteliti

2.3.2 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

2.3.2.1 Observasi yakni teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap obyek yang diamati secara langsung.

2.3.2.2 Wawancara (*interview*) yakni cara yang dilakukan dengan mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan penjelasan tentang masalah-masalah yang ada hubungannya dengan tenaga kerja Dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.4 Jenis Dan Sumber Data

2.4.1 Jenis Data

2.4.1.1 Data kuantitatif yang berupa berbagai jenis data dalam bentuk angka-angka ataupun hasil olahan data baik terhadap jumlah angkatan tenaga kerja dan jumlah pengeluaran pemerintah.

2.4.1.2 Data kualitatif yaitu data yang dapat mendukung data kuantitatif dalam pemecahan kasus yang berupa penjelasan secara deskriptif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi dalam pemecahan kasus seperti informasi – informasi yang berkaitan dengan masalah

2.4.2 Sumber data

2.4.2.1 Data Primer, data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian baik melalui pengamatan maupun wawancara (*interview*)

2.4.2.2 Data Sekunder, data yang telah ada pada obyek penelitian atau data hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, dimana data tersebut bersumber dari dokumen organisasi tersebut atau institusi lainnya, yang dianggap berkaitan atau relevan dengan masalah yang di bahas

2.5 Metode Analisis

2.5.1 Metode analisis Kualitatif

Dalam hal ini akan di paparkan berdasarkan analisis kondisi obyektif dan temuan-temuan yang dihubungkan dengan teori-teori ilmiah, sehingga diperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan aktual serta solusi-solusi terhadap pemecahannya.

2.5.2 Metode analisis Kuantitatif

Model analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisa pengaruh tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo Utara dengan metode analisis regresi berganda. Adapun formulasi dari analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut : (Sumarsono, 2004, hal 257)

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2$$

Dimana :

X_1 = Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo (Orang)

X_2 = Pengeluaran Pemerintah Provinsi Gorontalo a (Rp)

Y = Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo (%)

β_0 = intersep, konstanta yang merupakan rata – rata nilai Y apabila variabel lain dianggap konstan

Untuk memudahkan proses perhitungan, uji hipotesis akan digunakan bantuan Komputer dengan menggunakan fasilitas SPSS (*Statistical Program Service Solution*) versi 21.0.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Deskripsi Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo.

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun atau lebih yang bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang melakukan kegiatan lain, seperti sekolah maupu mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan.

Menurut BPS penduduk berumur 15 keatas dikatakan tenaga kerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu.

Berikut disajikan data penduduk bekerja Provinsi Gorontalo pada tabel dibawah ini :

Tabel : Jumlah Penduduk Bekerja Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2016

No	Tahun	Penduduk Bekerja
1	2007	340.842
2	2008	405.126
3	2009	420.962
4	2010	432.926
5	2011	445.210
6	2012	445.729
7	2013	449.104
8	2014	479.137
9	2015	493.687
10	2016	546.668

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk bekerja di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan atau peningkatan dari tahun 2007 hingga 2016, dimana pada tahun 2007 penduduk bekerja Provinsi Gorontalo adalah sebesar 340.842 orang, kemudian naik menjadi 405.126 pada tahun 2008, meningkat menjadi 420.969 tahun 2009, dan terakhir tahun 2016 meningkat menjadi 546.668 orang.

Secara umum penduduk bekerja di Provinsi Gorontalo ini dominan bekerja di sektor pertanian, dimana tahun 2007 penduduk yang bekerja di sektor pertanian kehutanan dan perikanan berjumlah 173.758 orang atau sebesar 47.91% dan tahun 2008 jumlahnya naik menjadi 184.148 orang namun persentasenya turun menjadi 45.45%, tahun 2009 jumlahnya kembali turun menjadi 172.130 atau menjadi 40.89% dan tahun 2010 naik lagi menjadi 176.974 orang atau 40.95%, kemudian tahun 2011 turun menjadi 159.123 atau menjadi 35,74%, tahun 2012 naik lagi jumlahnya menjadi 168.496 atau naik menjadi 37.80%, tahun 2013 turun lagi menjadi 164.637 orang atau turun menjadi 36.66%, tahun 2014 naik lagi menjadi 188.033 orang atau

naik menjadi 39.24%, tahun 2015 turun menjadi 171.104 atau menjadi 34.66% dan terakhir tahun 2016 jumlah penduduk bekerja disektor pertanian kehutanan dan perikanan adalah sebesar 167.445 orang atau 30.63% dari total penduduk bekerja di Provinsi Gorontalo.

3.1.2 Deskripsi Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Gorontalo

Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah atau belanja daerah.

Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah berdasarkan pada Permendagri No 13 tahun 2006 Tentang Pengolahan Keuangan Daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Kelompok belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintah sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian.

Berikut ini digambarkan kondisi pengeluaran pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel : Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2016 (Dalam Juta Rupiah)

No	Tahun	Realisasi Pengeluaran Daerah
1	2007	495.878,00
2	2008	537.171,73
3	2009	579.317,76
4	2010	567.230,39
5	2011	770.751,11
6	2012	885.021,15
7	2013	1.050.816,77
8	2014	1.204.490,04
9	2015	1.407.931,05
10	2016	1.595.894,75

Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum realisasi pengeluaran pemerintah Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dari tahun 2007-2016, dimana pada tahun 2007 realisasi pengeluaran pemerintah Provinsi Gorotalo sebesar Rp. 495.878,00 (dalam juta rupiah) kemudian mengalami kenaikan tahun 2008

menjadi Rp.537.171,73 (dalam juta rupiah) dan tahun 2009 yaitu menjadi Rp.579.317,76. (dalam juta rupiah). Pada tahun 2010 realisasi pengeluaran pemerintah turun menjadi Rp. 567.230,39 (dalam juta rupiah) dan kembali naik pada tahun 2011 menjadi Rp.770.751,11 (dalam juta rupiah) dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2016 menjadi Rp1.595.894,75 (dalam juta rupiah).

Pada tahun 2016 tercatat bahwa pengeluaran pemerintah provinsi Gorontalo didominasi oleh belanja operasi (lebih dari 60%) yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Adapun belanja modal porsinya masih sangat kecil dari total pengeluaran pemerintah.

3.1.3 Analisis Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo

Dari penjelasan diatas maka diharapkan bahwa tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Berikut adalah data penduduk bekerja, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel : Jumlah Penduduk Bekerja, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2016

No	Tahun	Variabel X1 (Penduduk Bekerja)	Variabel X2 (Realisasi Pengeluaran Daerah)	Variabel Y Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2007	340,842	495,878	7.51
2	2008	405,126	537,171	7.76
3	2009	420,962	579,317	7.54
4	2010	432,926	567,230	7.63
5	2011	445,210	770,751	7.68
6	2012	445,729	885,021	7.71
7	2013	449,104	1,050,816	7.67
8	2014	479,137	1,204,490	7.27
9	2015	493,687	1,407,931	6.22
10	2016	546,668	1,595,894	6.52

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2018

Dari tabel diatas, dapat dilihat data penduduk bekerja, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo tahun 2007-2016 sebagaimana telah dijelaskan diatas. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pengaruh data penduduk bekerja, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo, akan dianalisis menggunakan regresi sederhana dan pengolahan data menggunakan program SPSS (*Statistical Product Service Solution*) Versi 21,0 untuk mempermudah perhitungan. Yang selanjutnya dianalisis dengan metode regresi dimaksud dari tabel diatas.

Berdasarkan hasil olahan SPSS persamaan regresi dapat diketahui yaitu sebagaimana terlihat dalam lampiran hasil print out SPSS adalah :

$$Y = 7.466 + 0.276X_1 - 1.060X_2$$

Koefisien determinasi yang disimbolkan dengan $R^2 = (R \text{ Square})$ adalah 0,671 dan Koefisien R adalah 0,819.

Tingkat signifikansi seluruh koefisien korelasi satu sisi yang diukur dari probabilitas menghasilkan angka 0,020. Karena probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka korelasi antara variabel tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah (Variabel X_1 dan X_2) dan pertumbuhan ekonomi (Variabel Y) adalah signifikan. Selain itu terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan yakni tampak pada uraian sebagai berikut :

1. Descriptive Statistics dan Correlations.

- Rata – rata pertumbuhan ekonomi (X_1) adalah 7.3510 dengan standar deviasi 0.53968
- Rata – rata tenaga kerja (X_2) adalah 445939.10 dengan standar deviasi 54816.028
- Rata – rata pengeluaran pemerintah (X_2) adalah 909449.90 dengan standar deviasi 391902.991
- Tingkat signifikansi seluruh koefisien korelasi satu sisi yang diukur dari probabilitas menghasilkan angka 0,000. Karena probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka korelasi antara variabel X_1 , X_2 dan variabel Y adalah signifikan.

2. Variable Entered dan Model Summary

- Variabel yang dimasukkan adalah tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah sebagai variabel X_1 dan X_2 , dan tidak ada variabel yang dikeluarkan dari persamaan.
- Standard error of estimate adalah 0.35078 lebih kecil dari standard deviasi rata – rata pertumbuhan ekonomi (0.53968), artinya koefisien regresi lebih baik dijadikan sebagai prediktor pertumbuhan ekonomi dibanding dengan menggunakan metode mean atau rata – rata.

3. Anova dan Coeficients

- Dari uji Anova diperoleh F hitung 7.151 dengan tingkat signifikan 0,020. karena probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka model regresi signifikan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo, karena variabel bebas signifikan mempengaruhi variabel tak bebas.
- Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 7.466 + 0.276X_1 - 1.060X_2$ artinya apabila tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah (X_1 , X_2) tidak ada atau = 0 maka pertumbuhan ekonomi akan konstan pada tingkatan -7.466 dan $b_1 = 0,276$ artinya setiap adanya peningkatan variabel tenaga kerja sebanyak 1 satuan akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 0,276 satuan dari semula dengan asumsi faktor lain konstan; $b_2 = -1,060$ artinya setiap adanya peningkatan pengeluaran pemerintah sebanyak 1 satuan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 1,060 satuan dari semula dengan asumsi faktor lain konstan.

3.2 Pembahasan

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada

kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan penambahan tenaga kerja tersebut.

Selanjutnya pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintah sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut berbisnis, melainkan dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi. Pemerintah juga harus memperjuangkan pemerataan melalui program perpajakan dan redistribusi pendapatan untuk kelompok atau golongan masyarakat tertentu.

Dari tiga variabel tersebut, selanjutnya hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo yang dibuktikan oleh tingkat signifikansi seluruh koefisien korelasi satu sisi yang diukur dari probabilitas menghasilkan angka 0,020. Karena probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka korelasi antara variabel tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah (Variabel X1 dan X2) dan pertumbuhan ekonomi (Variabel Y) adalah signifikan.

Adanya tenaga kerja atau penduduk bekerja di Provinsi Gorontalo yang cukup tinggi selama tahun 2006-2016 berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Gorontalo. Hal tersebut dapat dilihat pada arah koefisien regresi variabel tenaga kerja (X1) bernilai positif, yang menjelaskan bahwa kenaikan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya arah koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah (X2) bernilai negatif, artinya semakin tinggi nilai dari variabel pengeluaran pemerintah (X2) maka akan diikuti oleh penurunan nilai pertumbuhan ekonomi (Y). Secara teori, para ekonom menjelaskan bahwa seharusnya dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatannya dimana pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintah sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian, diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal bisa dijelaskan karena pengeluaran pemerintah Provinsi Gorontalo lebih didominasi oleh komponen belanja operasi (lebih dari 60%) yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Adapun belanja modal porsinya masih sangat kecil dari total pengeluaran pemerintah. Selain itu secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi lebih banyak didorong dari komponen konsumsi.

Selanjutnya dilihat dari *Koefisien R* = 0,819 menunjukkan secara simultan atau secara bersama-sama tenaga kerja (X1) dan pengeluaran pemerintah (X2) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

R Square atau Determinasi 0,671 menunjukkan kontribusi variabel tenaga kerja (X1) dan pengeluaran pemerintah (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 67,1% dan selebihnya adalah faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Adapun dilihat dari Koefisien regresi parsial dimana nilai *t* (uji student) untuk variabel tenaga kerja (X1) dan pengeluaran pemerintah (X2) masing – masing adalah tenaga kerja (X1) = 0,54 dengan tingkat signifikansi 0,01 dan pengeluaran pemerintah (X2) = -2,099 dengan tingkat signifikansi 0,74 menunjukkan bahwa hanya variabel tenaga kerja (X1) yang memiliki hubungan yang signifikan pada taraf $\alpha = 0,05$ dengan variabel pertumbuhan ekonomi, dan dari angka koefisien partial ini, variabel tenaga kerja (X1) menunjukkan angka yang paling dominan mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo.

Berbasarkan hasil analisis di atas, maka terbukti bahwa tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan dapat membuktikan lewat penelitian ini bahwa tidak berpengaruhnya pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo, ditolak.

Penelitian ini di tunjang dengan penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini seperti halnya penelitian oleh Kaharu (2012) dengan judul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Gorontalo Utara. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis variabel pertumbuhan ekonomi meskipun pada objek yang berbeda, perbedaan lainnya adalah penelitian terdahulu menganalisis pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, sedangkan penelitian ini menganalisis tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian lainnya yaitu oleh Dwi Suryanto (2011) dengan judul “Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Subosukawonosraten Tahun 2004-2008. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis variabel tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi meskipun pada objek yang berbeda, perbedaan lainnya adalah pada variabel tingkat pendidikan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Jumlah penduduk bekerja di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan atau peningkatan dari tahun 2007 hingga 2016, dimana pada tahun 2007 penduduk bekerja Provinsi Gorontalo adalah sebesar 340.842 orang, kemudian naik menjadi 404.126 pada tahun 2008, meningkat menjadi 420.969 tahun 2009, dan terakhir tahun 2016 meningkat menjadi 546.668 orang. Secara umum penduduk bekerja di Provinsi Gorontalo ini dominan bekerja di sektor pertanian, dimana tahun 2007 penduduk yang bekerja di sektor pertanian kehutanan dan perikanan berjumlah 173.758 orang atau sebesar 47.91% dan tahun 2008 jumlahnya naik menjadi 184.148 orang namun persentasenya turun menjadi 45.45%, tahun 2009 jumlahnya kembali turun menjadi 172.130 atau menjadi 40.89% dan tahun 2010 naik lagi menjadi 176.974 orang atau 40.95%, kemudian tahun 2011 turun menjadi 159.123 atau menjadi 35,74%, tahun 2012 naik lagi jumlahnya menjadi 168.496 atau naik menjadi 37.80%, tahun 2013 turun lagi menjadi 164.637 orang atau turun menjadi 36.66%, tahun 2014 naik lagi menjadi 188.033 orang atau naik menjadi 39.24%, tahun 2015 turun menjadi 171.104 atau menjadi 34.66% dan terakhir tahun 2016 jumlah penduduk bekerja disektor pertanian kehutanan dan perikanan adalah sebesar 167.445 orang atau 30.63% dari total penduduk bekerja di Provinsi Gorontalo.

4.1.2 Realisasi pengeluaran pemerintah Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dari tahun 2007-2016, dimana pada tahun 2007 realisasi pengeluaran pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 495.878,00 (dalam juta rupiah) kemudian mengalami kenaikan tahun 2008 menjadi Rp.537.171,73 (dalam juta rupiah) dan tahun 2009 yaitu menjadi Rp.579.317,76. (dalam juta rupiah). Pada tahun 2010 realisasi pengeluaran pemerintah turun menjadi Rp. 567.230,39 (dalam juta rupiah) dan kembali naik pada tahun 2011 menjadi Rp.770.751,11 (dalam juta rupiah) dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2016 menjadi Rp1.595.894,75 (dalam juta rupiah).

4.1.3 Adanya tenaga kerja atau penduduk bekerja di Provinsi Gorontalo yang cukup tinggi selama tahun 2007-2016 berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Gorontalo. Hal tersebut dapat dilihat pada arah koefisien regresi variabel tenaga kerja (X1) bernilai positif, yang menjelaskan bahwa kenaikan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo.

5.2 Saran

5.2.1 Dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Gorontalo, sebaiknya pemerintah daerah fokus memberikan kemudahan berinvestasi bagi masyarakat, memberikan fasilitas kredit lunak bagi UMKM, bantuan permodalan bagi petani dan nelayan.

5.2.2 Dalam hal pengeluaran pemerintah, sebaiknya pemerintah daerah menaikan porsi belanja modal lebih banyak dibandingkan belanja operasi, mengingat belanja modal adalah ditujukan untuk pembangunan daerah.

5.2.3 Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provisni Gorontalo, sebaiknya pemerintah daerah membangun infrasturktur dasar seperti irigasi, tempat pelelangan ikan,serta akses jalan ke seluruh pelosok Gorontalo.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2016. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha*. BPS Provinsi Gorontalo
- Anonim, 2016. *Profil Provinsi Gorontalo*. BPS Provinsi Gorontalo Utara
- Arsyad, Lincolyn, 2010, *Ekonomi Pembangunan*, edisi Ke Lima, Bagian Penerbitan STIE YKPN : Yogyakarta.
- Irawan, dan Suparmoko, 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi ke enam, Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta
- Jhingan, ML. 2013. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Penerbit PT Raja Graindo ; Jakarta
- Mangkoesebroto, G,2008, *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*, BPFE Yogyakarta.
- Murni, Asfia, 2009, *Ekonomika Makro*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Maulana, Achmad, 2004, *Kamus Ilmiah Populer*, Penerbit Absolut, Yokyakarta
- Suparmoko, M dkk, 2000, *Pokok – Pokok Ekonomika*, Penerbit BPFE, Yokyakarta
- Samuelson, Paul A dan Nordhaus, William D,2004, *Ilmi Makro Ekonomi*.Jakarta PT. Media Edukasi.
- Sukirno, Sadono, 2004, *Makro Ekonomi (Teori Pengantar)*, edisi Ke 15, PT Rajagrafindo : Jakarta.
- Sumarsono, Sonny , 2004. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Jember : Graham Ilmu,
- Suparmoko. 2003, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, penerbit Andi, Yogyakarta
- Tarigan, Robinson. 2007, *Ekonomi Regional, Teori dan aplikasi*. Bumi Aksara : Jakarta
- Todaro, M.P, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga : Jakarta
- UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Permendagri No 13 tahun 2006 Tentang Pengolahan Keuangan